BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar terselenggarannya pengelolaan keuangan yang baik. dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Halim dan Iqbal, 2012: 63)).

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik, menimbulkan impikasi bagi manajemen pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, (Halim dan Iqbal, 2012: 64).

Senada dengan hal tersebut Mardiasmo (2009: 21) mengatakan dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah

pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.. Agar akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan, diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, transparansi, adil, efektif dan efisien.

Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suati sistem akuntansi keuangn daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai, (Halim, 2007: 35).

Pentingnya sistem akuntansi keuangan daerah ini juga dijelaskan dalam UU No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi Negara kesatuan RI. Sistem akuntansi keuangan daerah sebagai sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi kauangan, asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pusat, yang meghasilkan informasi akuntansi dan laporan yang diperlukan oleh badan-badan diluar pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif, antara lain DPR, maupun oleh berbagai tingkat manejemen pada pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang optimal maka diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat tercapai khususnya akuntabilitas pada SKPD. Namun kenyataanya pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango masih terdapat masalah mengenai akuntabilitas, seperti publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Permsalahan tersebut tentunya merupakan dampak dari kurang optimalnya sistem akuntansi keuangan daerah. Kabupaten Bone Bolango mendapatkan predikat wajar dengan Pengecualian (WDP) pada pengelolaan keuangan TA 2013. Hasil tersebut diperkuat dengan temuan BPK (http://www.gorontalo.bpk.go.id/?p=1768, 2013) bahwa

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak dapat diketahui keberadaannya sebesar Rp16.002.569.966,30;

2. Biaya perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi yang belum dikapitalisasi ke aset terkait pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.252.037.626,00 dan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp64.151.950.964,00;
3. Biaya ganti rugi tanaman dan bangunan sebesar Rp1.952.893.699,00 belum dikapitalisasi ke Aset Tanah terkait;dan
4. Aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan buku-buku sebesar Rp3.318.049.465,00 tidak dapat diketahui keberadaannya serta tidak dapat dirinci item jenis asetnya

Berbagai masalah tersebut tentunya dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang kurang baik yang hingga kini masih terdapat berbagai kekurangan, hal tersebut dapat dilihat dari temuan BPK (http://www.gorontalo.bpk.go.id/?p=2334, 2015) bahwa:

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran belum memadai;
2. Aset Tanah belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal;
3. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum tertib

Selain itu, masalah juga dapat dilihat dari aspek akuntabilitas pelaporan keuangan, dimana pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut atas apa yang direkomendasikan

oleh BPK. Hal tersebut terbukti pada laporan keuangan tahun 2015 yang masih memiliki kekurangan yakni pada pencatatan aset atau pencatatan selain kas. Hal ini dikaibatkan belum optimalnya sistem akuntansi keuangan daerah, dalam hal ini belum pahamnya bendahara pengeluaran dalam pengelolaan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Berbagai hasil tersebut menunjukan bahwa pentingnya penelitian untuk mengetahuai lebih lanjut mengenai dampak dari 2 aspek tersebut terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Alim (2013) dengan judul penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada lokasi dan sampel penelitian. Dimnana penelitian ini memfokuskan pada keseluruhan SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sementara penelitian terdahulu hanya fokus pada 1 instnasi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kabupaten Bone Bolango.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan akuntabilitas publik, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial
2. Masalah juga dapat dilihat dari aspek akuntabilitas pelaporan keuangan, dimana pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut atas apa yang direkomendasikan oleh BPK. Hal tersebut terbukti pada laporan keuangan tahun 2015 yang masih memiliki kekurangan yakni pada pencatatan aset atau pencatatan selain kas. Hal ini dikaibatkan belum optimalnya sistem akuntansi keuangan daerah, dalam hal ini belum pahamnya bendahara pengeluaran dalam pengelolaan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yakni:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan atas penelitian yang dilakukan yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
3. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya tentang SKAD, dan akuntabilitas. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang penerapan sistem pengendalian intern dan SKAD dalam meningkatkan akuntabilitas serta memberikan masukan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif dimasa yang akan dating.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Rumusan Masalah 7

1.4 Tujuan Penelitian 7

1.5 Manfaat Penelitian 7

1.5.1 Manfaat Teoritis 7

1.5.2 Manfaat Praktis 8

BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS **9**

2.1 Kajian Teori 9

2.1.1 Akuntabilitas 11

2.1.2 Sistem Akuntanasi Keuangan Daerah 18

2.2 Penelitian Terdahulu 30

2.3 Kerangka Pikir 32

2.4 Hipotesis 34

BAB III METODE PENELITIAN 36

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 36

3.2 Desain Penelitian 36

3.3 Definisi Operasional Vairabel Penelitian 36

3.4 Populasi dan Sampel 39

3.4.1 Populasi 39

3.4.2 Sampel 40

3.5 Sumber Data 41

3.6 Teknik Pengumpulan Data 41

3.7 Pengujian Instrumen Penelitian 42

3.7.1 Uji Validitas…….....42

3.7.2 Uji Reabilitas 43

3.8 Methods Of Successive Interval (MSI) 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48

4.1 Hasil Penelitian 48

4.1.1 Gambar Umum Responden 48

4.1.2 Pengujian Kualitas Instrumen 49

4.1.2.1 Uji Validitas 49

4.1.2.2 Uji Reliabilitas 50

4.1.3 Transpormasi Data (Konversi Data Ordinal ke Interval) 52

4.1.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 53

4.1.5 Pengujian Pra Syarat Analisis 57

4.1.6 Analisis Regresi..... 62

4.2 Pembahasan..... 67

BAB V PENUTUP..... 74

5.1 Kesimpulan 74

5.2 Saran 75

DAFTAR PUSTAKA……78

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Lampiran :

1. Kuesioner 78
2. Uji Kualitas Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 83
3. Jawaban Responden 87
4. Hasil Analisis Jawaban Responden 91
5. Proses Konversi Data (MSI SUMMARY)..... 92
6. Data Setelah Konversi MSI…….....94
7. Pengujian Pra Syarat Analisi……98
8. Analisi Regresi (OUTPUT SPSS)……100
9. r Tabel (Pengujian Validitas)……103
10. t Tabel (Pengujian Hipotesis)……...104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir 34

Gambar 2. Desain Penelitian 36